

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TERMINAL PANGKAJENE TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Muliani, ²⁾Nuraini Kasman, ³⁾Dewi A. Mahmud, ⁴⁾Nurjannah Nonci, ⁵⁾Andi Sinrang

¹⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

²⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

³⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

⁴⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

⁵⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

¹⁾mulisamiri77@gmail.com, ²⁾nurainikasman@gmail.com, ³⁾dewiamahmud@gmail.com

Abstrak

Implementasi Kebijakan Retribusi Terminal Pangkajene Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Sidenreng Rappang. implementasi kebijakan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sidenreng Rappang belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi terminal tidak mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pemungutan retribusi terminal tersebut sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak maksimal mencapai target. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi kebijakan Perbub Nomor 5 Tahun 2017 di Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga untuk menganalisis peningkatan penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jumlah populasi yang digunakan sebanyak 330 orang. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara Teknik random sampling yaitu teknik pemilihan responden yang dilakukan secara acak dengan tanpa memberikan perbedaan apapun, sehingga semua anggota populasi dapat terpilih sebagai sampel Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan yaitu : 5% - 10%, 10% - 15%, 15% - 20%, Maka jumlah populasi yang diambil sesuai dengan rumus tersebut sebanyak $330 \times 10\% = 33$ responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Perbub Nomor 5 Tahun 2017 di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kurang maksimal hal ini terlihat dari hasil penelitian yang hanya mendapatkan 66%, sedangkan penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang memadai hal ini tentu saja di pengaruhi oleh kelima factor indicator retribusi yang hanya mendapatkan 61% dari 100% hasil yang diharapkan hal ini tentu saja perlu ditingkatkan untuk menunjang pendapatan asli daerah.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Retribusi, Peningkatan PAD.

Abstract

Implementation of the Pangkajene Terminal Retribution Policy on the Increase of Pad Sidenreng Rappang Regency. the implementation of the terminal retribution collection policy in Sidenreng Rappang Regency has not been carried out properly, so that the terminal retribution income does not achieve the desired results. This is because there are still people who do not understand the importance of collecting terminal fees so that the implementation of collecting terminal fees in Sidenreng Rappang Regency does not reach the target optimally. The purpose of this study was to analyze the implementation of Perbub policy Number 5 of 2017 in Sidenreng Rappang Regency and also to analyze the increase in acceptance of Terminal Retribution in Sidenreng Rappang Regency. The total population used is 330 people. The sampling technique was carried out by means of a random sampling technique, namely the respondent selection technique was carried out randomly without giving any difference, so that all members of the population could be selected as samples. The formula used to determine the sample in this study was: 5% - 10%, 10% - 15%, 15% - 20%, then the total population taken according to the formula is $330 \times 10\% = 33$ respondents. The results of the study indicate that the implementation of the Perbub policy Number 5 of 2017 in Sidenreng Rappang Regency is less than optimal, this can be seen from the results of the study which only received 66%, while the acceptance of Terminal Retribution in Sidenreng Rappang Regency was

still inadequate, this of course was influenced by the five factors. The retribution indicator, which only gets 61% of the 100% expected results, of course needs to be increased to support local revenue.

Keywords: Implementation, Policy, Retribution, Increasing PAD.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri ditunjukkan melalui hadirnya revisi UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 dan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima.

Perangkat daerah yang memiliki kompetensi memungut retribusi dan pajak daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu. Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Retribusi Jasa Usaha. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 6 jenis Retribusi jasa usaha, salah satunya yaitu Retribusi Terminal yang merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya tentunya dengan implementasi yang tepat dan sosialisasi menyeluruh ke masyarakat pengguna jasa tersebut.

Lebih spesifik, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal dinyatakan pada Pasal 6 Ayat 1 bahwa diwajibkan membayar tariff retribusi bagi setiap kendaraan yang masuk/keluar terminal begitu pula atas penggunaan fasilitas terminal seperti parkir, sewa kios dan pelataran, pemanfaatan WC.

Data realisasi Retribusi terminal Kabupaten Sidenreng Rappang yang peneliti peroleh dari Dokumen dinas pendapatan daerah menunjukkan adanya penurunan

target realisasi sejak tahun 2013 dibuktikan dengan data berikut:

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2013	Rp. 1.870.100.0 00	Rp. 1.781.129.8 90	95,24 %
2.	2014	Rp. 1.891.983.1 17	Rp. 1.801.362.6 13	95,21 %
3.	2015	Rp. 2.098.504.0 00	Rp. 1.900.900.6 13	90,59 %

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 2016

Data realisasi Retribusi Kabupaten yang peneliti peroleh dari Dokumen RKPD menunjukkan adanya peningkatan target realisasi sejak tahun 2017 dibuktikan dengan data berikut:

Uraian	Realisasi		
	2017	2018	2019
Retribusi Daerah	26.129.638.000	61.550.000	84.475.000

Sumber: RKP Kabupaten Sidrap 2019

Sisi lain Data DJPK Kementerian Keuangan per 24 Oktober 2019 diketahui bahwa PAD yang diperoleh Kabupaten Sidrap dari retribusi terminal termasuk lebih rendah dibandingkan dengan PAD Retribusi Terminal Kabupaten di sekitarnya. Terdapat peningkatan hasil realisasi retribusi dari tahun ke tahun namun dibandingkan data target retribusi tahunan nampak fluktuatif (kadang naik dan di lain tahun melebihi target (Arifai, 2020). Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2017 hanya memperoleh sebesar Rp.33.400.000,- sedangkan Kabupaten Pinrang Rp.16,733,000, Kabupaten Wajo Rp.378,301,000,- dan Kabupaten Soppeng Rp. 129,500,000,- (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Merujuk pada data tersebut di atas maka implementasi kebijakan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sidenreng Rappang belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi terminal tidak mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pemungutan retribusi terminal tersebut sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak maksimal mencapai target.

Retribusi daerah meskipun hanya menyumbang sedikit terhadap PAD Daerah namun merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang juga diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk

melaksanakan otonomi sendiri. Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang berotonomi daerah. Sehingga selain perlu meningkatkan implementasi pemungutan dan sosialisasi yang efektif juga retribusi daerah ini memberlakukan sistem Self Awareness, yang berarti wajib pajak dapat menyadari sendiri pentingnya membayar retribusi sesuai dengan ketentuan undang-undang (Sunarto dan Fatimah, 2016: 93). Jadi, realisasi retribusi terminal dapat naik dan umumnya dapat meningkat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Edward III dalam Subarsono (2011:90) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards dalam Budi Winarno (2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta, keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Ronald C. Fisher (2010:179), seorang ahli keuangan negara dan daerah menyatakan teori retribusi sebagai berikut: "Secara teoritis, pengenaan retribusi harus mencapai dua tujuan. Pertama, retribusi harus membuat wajib retribusi menghadapi harga sesungguhnya atas keputusan konsumsi mereka, menciptakan suatu insentif untuk pilihan efisien. Tujuan yang kedua pengenaan retribusi untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pajak daerah. Berkaitan dengan teori tersebut, dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa harga barang dan/atau jasa (layanan) yang diberikan oleh pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (marginal cost), yaitu biaya untuk melayani konsumen yang terakhir".

Menurut Davey (2009:132), retribusi diartikan sebagai suatu pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelaksanaannya. Kemudian Suparmoko (2014:94) menyatakan bahwa, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Mengenai teori retribusi di atas, yang menjadi poin penting adalah pemenuhan syarat-syarat ini harus diikuti dengan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib retribusi yang telah membayar retribusi. Obyek retribusi daerah hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah dan bukan hanya layanan yang seadanya. Perbaikan dan penambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib retribusi juga harus dilakukan sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar. Perbaikan dan penambahan fasilitas berhubungan dengan manajemen pendapatan asli daerah yang akan dibahas selanjutnya.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan akurat berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan informan-informan yang telah peneliti kualifikasikan berdasarkan dengan keterkaitan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Manajemen Retribusi Terminal Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun tipe penelitiannya yaitu diulas secara deskriptif. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa metode ini relevan materi penelitian ini, dimana penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka menganalisis dan memahami kebijakan manajemen terminal sebagai hasil kelanjutan dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian kemampuan teknis petugas retribusi serta menggali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan retribusi tersebut akan menjadi outcome untuk mengukur peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Sedangkan dasar penelitiannya adalah wawancara kepada narasumber/informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Jamaluddin (2015:121).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Papan informasi mengenai tarif retribusi dan kepatuhan dalam membayar retribusi di terminal dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Jawaban	B (Bobot)	Frekuensi	B X F	%
Sangat Setuju	5	12	48	36,36
Setuju	4	14	42	42,43
Cukup Setuju	3	7	14	21,21
Kurang Setuju	2	-	-	-
Tidak Setuju	1	-	-	-

Jumlah	-	33	104	100
Rata-rata skor ($\sum F.X$)/N = 104/33 = 3,15		Rata-rata persentase 3,15/5 × 100% = 63%		

Hasil Olahan Kuisioner September 2020

Hasil olahan data kuisioner diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan Adanya papan informasi mengenai tarif retribusi dan kepatuhan dalam membayar retribusi di terminal sangat setuju sebanyak 12 orang atau 36,36% sedangkan yang menyatakan Adanya papan informasi mengenai tarif retribusi dan kepatuhan dalam membayar retribusi di terminal setuju sebanyak 14 orang atau 42,43% dan yang menyatakan Adanya papan informasi mengenai tarif retribusi dan kepatuhan dalam membayar retribusi di terminal cukup setuju sebanyak 7 orang atau 21,21% dengan skor rata-rata 3,15 dinilai setuju / baik dengan persentase 63%. Hal ini berarti bahwa perlu adanya papan informasi mengenai tarif retribusi yang berlaku pada terminal agar supaya dapat dipahami oleh pengguna fasilitas. Dengan adanya papan informasi mengenai tarif retribusi yang berlaku pada terminal maka diharapkan munculnya kesadaran dari para pengguna fasilitas terminal untuk membayar retribusi demi peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penting adanya diklat atau pelatihan bagi petugas retribusi untuk peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Jawaban	B (Bobot)	Frekuensi	B X F	%
Sangat setuju	5	13	52	39,40
Setuju	4	8	24	24,23
Cukup setuju	3	12	24	36,36
Kurang setuju	2	-	-	-
Tidak setuju	1	-	-	-
Jumlah		33	100	100
Rata-rata skor ($\sum F.X$)/N = 100/33 = 3,03		Rata-rata % 3,03/5 × 100% = 60,60%		

Hasil Olahan Kuisioner September 2020

Hasil olahan data kuisioner diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan Penting adanya diklat atau pelatihan bagi petugas retribusi untuk peningkatan sumber daya manusia sangat setuju sebanyak 13 orang atau 39,40%, sedangkan yang menyatakan Penting adanya

diklat atau pelatihan bagi petugas retrebusi untuk peningkatan sumber daya manusia setuju sebanyak 8 orang atau 24,23% dan yang menyatakan Penting adanya diklat atau pelatihan bagi petugas retrebusi untuk peningkatan sumber daya manusia cukup setuju sebanyak 12 orang atau 36,36% dengan skor rata-rata 3,03 dinilai setuju / baik dengan persentase 60,60%

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Analisis data pada table distribusi frekuensi menyatakan bahwa sumberdaya dengan skor rata-rata 3,03 dinilai setuju / baik dengan persentase 60,60%. Sumberdaya manusia yang ada di terminal Pangkajene sudah dianggap baik dalam melaksanakan tugas pemungutan retrebusi dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya begitu pula dengan penanggung jawab terminal turun memantau dan memberi arahan kepada petugasnya untuk berdisiplin dalam melaksanakan tugas agar target penarikan retrebusi yang dibebankan kepada mereka dapat terpenuhi dengan baik.

Kesesuaian kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan petugas retrebusi dengan tetap berpegang pada prinsip komitmen, kejujuran, sifat demokratis dapat dilihat pada tabel berikut:

Jawaban	B (Bobot)	Frekuensi	B XF	%
Sangat setuju	5	15	60	45,45
Setuju	4	15	60	45,45
Cukup setuju	3	3	6	9,10
Kurang setuju	2	-	-	-
Tidk setuju	1	-	-	-
Jumlah		33	126	100
Rata-rata skor ($\sum F.X$)/N = 126/33 = 3,81			Rata-rata % 3,81/5×100% = 76,20%	

Hasil Olahan Kuissioner September 2020

Hasil olahan data kuissioner diatas dapat dilihat bahwa resonden yang menyatakan Kesesuaian kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan petugas retrebusi dengan tetap berpegang pada prinsip komitmen, kejujuran, sifat demokratis sangat setuju sebanyak 15 orang atau 45,45%, sedangkan yang

menyatakan Kesesuaian kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan petugas retrebusi dengan tetap berpegang pada prinsip komitmen, kejujuran, sifat demokratis setuju sebanyak 15 orang atau 45,45% dan yang menyatakan Kesesuaian kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan petugas retrebusi dengan tetap berpegang pada prinsip komitmen, kejujuran, sifat demokratis cukup setuju sebanyak 3 orang atau 9,10% dengan skor rata-rata 3,81 dinilai setuju / baik dengan persentase 76,20%.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Analisis data pada table distribusi frekuensi menyatakan bahwa disposisi dengan skor rata-rata 3,81 dinilai setuju / baik dengan persentase 76,20%. Komitmen, Kejujuran, dan sifat demokratis sangat dibutuhkan dalam penarikan retrebusi terminal dan ini sudah ditunjukkan oleh petugas penarik retrebusi dan penanggung jawab terminal hal ini terlihat dari komitmen mereka dalam melaksanakan tugas penuh dengan tanggung jawab begitu pula dengan tingkat kejujuran yang dinilai dari jumlah target retrebusi bias terpenuhi dalam setiap satu priode begitupun dengan sikap demokratis yang ditunjukkan oleh petugas pemungut retrebusi dan penanggung jawab terminal dalam melaksanakan tugas dimana sering terjadi masalah sesama sopir angkutan dengan sigap dapat menyelesaikan dengan damai tanpa harus berurusan dengan hukum.

Penyelenggaraan pendapatan asli daerahdengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) dan bagan organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Jawaban	B (Bobot)	Frekuensi	B XF	%
Sangat setuju	5	11	44	32,80
Setuju	4	20	60	60,60
Cukup setuju	3	2	4	6,60

Kurang setuju	2	-	-	-
Tidak setuju	1	-	-	-
Jumlah		33	108	100
Rata-rata skor ($\sum F.X$)/N = 108/33 = 3,27			Rata-rata % $3,27/5 \times 100\% = 65,45\%$	

Hasil Olahan Kuisioner September 2020

Hasil olahan data kuisioner diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan dalam penyelenggaraan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) dan bagan organisasi sangat setuju sebanyak 11 orang atau 32,80%, sedangkan yang menyatakan dalam penyelenggaraan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) dan bagan organisasi setuju sebanyak 20 orang atau 60,60% dan yang menyatakan dalam penyelenggaraan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) dan bagan organisasi cukup setuju sebanyak 2 orang atau 6,60% dengan skor rata-rata 3,27 dinilai setuju / baik dengan persentase 65,45%.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Analisis data pada table distribusi frekuensi struktur birokrasi menyatakan bahwa skor rata-rata 3,27 dinilai setuju / baik dengan persentase 65,45%. Struktur birokrasi yang berlaku pada terminal pangkajene tidak lepas dari aturan kepala daerah atau standar operasional prosedur petugas pemungut retribusi terminal tidak lepas dari peraturan daerah yang tertuang pada Perbub Nomor 5 Tahun 2017 yang mempunyai aturan atau standar prosedur dalam melaksanakan tugas penarikan retribusi terminal. Setiap dari petugas ataupun pengguna fasilitas terminal mempunyai kewajiban mematuhi standar operasional prosedur yang tertuang dalam Perbub Nomor 5 Tahun 2017 tersebut.

Analisis hasil rata-rata persentase dari 4 item pertanyaan pada indikator implementasi kebijakan diatas, didapatkan hasil rata-rata persentase 66,31%, Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator implementasi kebijakan ini berada pada kategori "baik". Teori yang ditawarkan oleh edwar III dalam hal kebijakan bisa diterapkan dalam membuat kebijakan selanjutnya tentang retribusi agar lebih meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator implementasi kebijakan

No	Tanggapan Responden	Rata-Rata Skor	Rata-Rata Persentase
1	Komunikasi	3,15	63%
2	Sumberdaya	3,03	60,60%
3	Disposisi	3,81	76,20%
4	Struktur Birokrasi	3,27	65,45%
Jumlah rata-rata		3,32	66,31

Akumulasi hasil rata-rata persentase dari 4 item pertanyaan pada indikator implementasi kebijakan diatas, maka didapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 66,31%, Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori "baik". Adapun keseluruhan frekuensi dari variabel adalah sebesar 466. Untuk mengetahui jumlah persentase, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus Nasir, 2011:53.

$$= \frac{438}{5 \times 4 \times 33} = \frac{438}{660} = 0,66 \times 100\% = 66\%$$

Jadi, nilai dari indikator implementasi kebijakan adalah 66% dari 100% hasil yang diharapkan. Peningkatan penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pelaksanaannya bersifat efisien dan efektif dapat dilihat pada tabel berikut :

Jawaban	B (Bobot)	Frekuensi	B XF	%
Sangat setuju	5	3	12	9,09
Setuju	4	18	54	54,55
Cukup setuju	3	12	24	36,36
Kurang setuju	2	-	-	-
Tidak setuju	1	-	-	-
Jumlah		33	90	100
Rata-rata skor ($\sum F.X$)/N = 90/33 = 2,7			Rata-rata % $2,7/5 \times 100\% = 45,40\%$	

Hasil Olahan Kuisioner September 2020

Hasil olahan data kuisioner diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan Pelaksanaannya bersifat efisien dan efektif sangat setuju sebanyak 3 orang atau 9,09%, sedangkan yang menyatakan Pelaksanaannya bersifat efisien dan efektif setuju sebanyak 18 orang atau 54,55% dan yang menyatakan Pelaksanaannya bersifat efisien dan efektif cukup setuju sebanyak 12 orang atau 36,36% dengan skor rata-rata 2,72 dinilai cukup setuju / baik dengan persentase 45,40%. Dalam hal penarikan retrebusi harus bersifat efisien dan efektif agar tidak memerlukan waktu yang banyak serta tidak menyulitkan pengguna layanan olehnya itu dari analisis data mengenai retrebusi dengan pelaksanaan yang bersifat ekonomis. Dari analisis data yang dilakukan terhadap pelaksanaan retrebusi bersifat ekonomis dengan skor rata-rata 2,72 dinilai cukup setuju / baik dengan persentase 45,40% hal menunjukkan bahwa masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal pelayanan utamanya cek point untuk angkutan barang dan angkutan umum.

Adanya imbalan langsung kepada pembayar dapat dilihat pada tabel berikut:

Jawaban	B (Bobot)	Frekuensi	B XF	%
Sangat setuju	5	3	52	39,40
Setuju	4	18	24	24,23
Cukup setuju	3	12	24	36,36
Kurang setuju	2	-	-	-
Tidk setuju	1	-	-	-
Jumlah		33	100	100
Rata-rata skor ($\sum F.X$)/N = 100/33 = 3,03			Rata-rata % 3,03/5×100% = 60,60%	

Hasil Olahan Kuisioner September 2020

Hasil olahan data kuisioner diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan Ada imbalan langsung kepada pembayar sangat setuju sebanyak 13 orang atau 39,40%, sedangkan yang menyatakan Ada imbalan langsung kepada pembayar setuju sebanyak 8 orang atau 24,23% dan yang menyatakan Ada imbalan langsung kepada pembayar cukup setuju sebanyak 12 orang atau 36,36% dengan skor rata-rata 3,03 dinilai cukup baik dengan persentase 60,60%.

Penarikan retrebusi diperuntukkan untuk perbaikan fasilitas yang ada pada terminal hal ini untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna terminal sehingga para pengguna merasa nyaman dan bias meningkatkan pembayaran retrebusi. Dari analisis data yang dilakukan terhadap

pelaksanaan retrebusi dengan imbalan langsung kepada pembayar dengan skor rata-rata 3,03 dinilai cukup baik dengan persentase 60,60%. hal menunjukkan bahwa fasilitas yang didapatkan dari pembayaran retrebusi cukup memuaskan bagi pengguna terminal namun hal ini masih perlu ditingkatkan lagi dengan tetap menjaga keteraturan kelura masuk kendaraan dalam terminal sehingga tidak terjadi kesemrautan lalu lintas p0engguna terminal.

lurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar dapat dilihat pada tabel berikut:

Jawaban	B (Bobot)	Frekuensi	B XF	%
Sangat setuju	5	5	20	15,15
Setuju	4	21	63	63,64
Cukup setuju	3	7	21	21,21
Kurang setuju	2	-	-	-
Tidk setuju	1	-	-	-
Jumlah		33	104	100
Rata-rata skor ($\sum F.X$)/N = 104/33 = 3,15			Rata-rata % 3,15/5×100% = 63%	

Hasil Olahan Kuisioner September 2020

Hasil olahan data kuisioner diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan lurannya memenuhi persyaratan formal dan material sangat setuju sebanyak 5 orang atau 15,15%, sedangkan yang menyatakan lurannya memenuhi persyaratan formal dan material setuju sebanyak 21 orang atau 63,64% dan yang menyatakan lurannya memenuhi persyaratan formal dan material cukup setuju sebanyak 7 orang atau 21,21% dengan skor rata-rata 3,15 dinilai setuju / baik dengan persentase 63%. Retrebusi harus memiliki aturan atau standar operasional prosedur dalam hal ini yang menjadi acuan SOP adalah perbup nomor 15 tahun 2017. Dari analisis data yang dilakukan terhadap pelaksanaan retrebusi untuk iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar dengan skor rata-rata 3,03 dinilai cukup baik dengan persentase 60,60%. hal menunjukkan bahwa standar operasional prosedur yang mengacu pada perbup nomor 15 tahun 2017 belum maksimal pelaksanaannya sebagai acuan dalam penarikan retrebusi pada Terminal Pangkajene Kabupatebn Sidenreng Rappang.

Retribusi umumnya merupakan pungutan yang fungsi budgetairnya tidak

menonjol dapat dilihat pada table:

Jawaban	B (Bobot)	Frekuensi	B XF	%
Sangat setuju	5	20	80	60,61
Setuju	4	6	18	18,18
Cukup setuju	3	7	14	21,21
Kurang setuju	2	-	-	-
Tidak setuju	1	-	-	-
Jumlah		33	100	100
Rata-rata skor ($\sum F.X$)/N = 112/33 = 3,39			Rata-rata % 3,39/5×100% = 67,80%	

Hasil Olahan Kuisioner September 2020

Hasil olahan data kuisioner diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan Retribusi umumnya merupakan pungutan yang fungsi budgetairnya tidak menonjol sangat setuju sebanyak 20 orang atau 60,61%, sedangkan yang menyatakan Retribusi umumnya merupakan pungutan yang fungsi budgetairnya tidak menonjol cukup setuju sebanyak 6 orang atau 18,18% dan yang menyatakan Retribusi umumnya merupakan pungutan yang fungsi budgetairnya tidak menonjol cukup setuju sebanyak 7 orang atau 21,21% dengan skor rata-rata 3,39 dinilai setuju / baik dengan persentase 67,80%. Hasil retribusi dari terminal dalam satu priode kalau di akumulasi tidak cukup untuk membangun pasilitas yang lebih baik dari yang ada sekarang mengingat hasil retribusi terminal masuk dalam pendapatan daerah sedangkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pada terminal membutuhkan dana operasional dalam setiap aktivitasnya. Dari analisis data yang dilakukan terhadap Retribusi umumnya merupakan pungutan yang fungsi budgetairnya tidak menonjol dengan skor rata-rata 3,39 dinilai setuju / baik dengan persentase 67,80%. Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi terminal tidak terlalu mempengaruhi pendapatan asli daerah dimana hasil retribusi terminal yang dipungut tidak semuanya masuk dalam kas daerah sebagian dipakai dalam aktivitas operasional kerja.

Hal-hal tertentu retribusi digunakan untuk tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat dapat dilihat pada table:

Jawaban	B (Bobot)	Frekuensi	B XF	%
Sangat setuju	5	11	44	33,33

Setuju	4	12	36	18,18
Cukup setuju	3	10	20	30,31
Kurang setuju	2	-	-	-
Tidak setuju	1	-	-	-
Jumlah		33	100	100
Rata-rata skor ($\sum F.X$)/N = 100/33 = 3,03			Rata-rata % 3,03/5×100% = 60,60%	

Hasil olahan kuesioner 2020

Hasil olahan data kuisioner diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan Dalam hal-hal tertentu retribusi digunakan untuk tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat sangat setuju sebanyak 11 orang atau 33,33%, sedangkan yang menyatakan Dalam hal-hal tertentu retribusi digunakan untuk tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat setuju 12 orang atau 36,36% dan yang menyatakan Dalam hal-hal tertentu retribusi digunakan untuk tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat cukup setuju sebanyak 10 orang atau 30,31% dengan skor rata-rata 3,03 dinilai cukup setuju / baik dengan persentase 60,60%. Dari analisis data yang dilakukan terhadap Retribusi umumnya pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat dengan skor rata-rata 3,03 dinilai cukup setuju / baik dengan persentase 60,60%. Hal ini menunjukkan bahwa Pungutan retribusi atas pelayanan jasa yang dilakukan oleh pengelola terminal banyak mengalami kendala utama angkutan umum dan angkutan barang pada hari-hari tertentu saja yang mengalami peningkatan sedangkan pada hari-hari biasa pendapatan dari hasil retribusi berkurang yang mengakibatkan fasilitas yang ada di terminal tidak bisa difungsikan secara maksimal begitu pula bila terjadi peningkata aktivitas maka fasilitas di terminal terkadang tidak memadai untuk para pengguna terminal hal ini menjadi pertimbangan daerah dalam hal merumuskan aturan pengelolaan dana dari hasil retribusi terminal. Kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan sangat tergantung atas kemampuannya untuk mendanai layanan

tersebut. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari potensi daerah itu sendiri serta pemanfaatannya. Dengan demikian, selain pajak daerah, maka retribusi merupakan sumber penerimaan pemerintahan daerah yang dapat menyediakan pelayanan dan barang publik. Selain itu, retribusi merupakan jalan yang berpotensi mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk sektor pendapatan.

Selanjutnya rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator Peningkatan penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tanggapan Responden	Rata-Rata Skor	Rata-Rata Persentase
1	Pelaksanaannya bersifat ekonomis	2,27	45,40%
2	Ada imbalan langsung kepada pembayar	3,03	60,60%
3	lurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar	3,15	63%
4	Retribusi umumnya merupakan pungutan yang fungsi budgetairnya tidak menonjol	3,39	67,80%
Jumlah rata-rata		2.97	59,48%

Akumulasi hasil rata-rata persentase dari 5 item pertanyaan pada indikator Peningkatan penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Sidenreng Rappang diatas, maka didapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 59,48%, Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “cukup baik”.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis yang dilakukan terhadap Implementasi kebijakan Perbub Nomor 5 Tahun 2017 di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kurang maksimal hal ini terlihat dari hasil penelitian yang hanya mendapatkan 66% dari 100% hasil yang diharapkan hal ini dipengaruhi dari factor sumberdaya manusianya serta factor

komunikasi serta struktur organisasi yang masih perlu dibenahi oleh dinas yang terkait.

2. Peningkatan penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang memadai hal ini tentu saja di pengaruhi oleh kelima factor indicator retribusi yang hanya mendapatkan 61% dari 100% hasil yang diharapkan hal ini tentu saja perlu ditingkatkan untuk menunjang pendapatan asli daerah.

E. REFERENSI

- Ahmad, Jamaluddin. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- C. Fischer, Ronald. (2013). *State and Local Public Finance*. USA : Times Mirror Higher Education Group
- Davey, K.J. (2009). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta : UI Press
- Haritz, Benyamin (2010). *Peran Administrasi Pemerintah Daerah : Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Barat*. Jawa Barat
- James McMaster. (2011). *Urban Financial Management A Training Manual*. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development
- M Suparmoko. (2014). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : BPFE
- Mc Queen (2013). *Development of a Model for User Fees, “A Model on Policy Development in Creating and Maintaining User Fees for Municipalities”*, MPA Research Paper, Submitted to: The Local Government Program, Dept. of Political Science, The Univ. Western Ontario
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. *Retribusi Terminal*. Sidenreng Rappang: JDIH
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfaberta

Suparmoko (2014). *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Perc.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Zorn (2009). *Local Government Finance*. Chicago: Concept and Practices

(www.djpk.kemenkeu.go.id)